

PERAN POST TRUTH SEJARAH DALAM MELANGGENGKAN LOGIKA MISTIKA DI INDONESIA

Oleh :

Risdo Sappe Tua Purba¹⁾, Sri Rahayu²⁾, Pujiati³⁾, Lom Lom Suwondo⁴⁾, Mutiara Br Aruan⁵⁾, Muhammad Nur Nainggolan⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara

¹email: risdosappetuapurba15@gmail.com

²email: srirahayuaiyy@gmail.com

³email: pujiati@usu.ac.id

⁴email: lomlomsuwondo7@gmail.com

⁵email: mutiaraaruan62@gmail.com

⁶email: nurnainggolan@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 18 Desember 2025

Revisi, 6 Januari 2026

Diterima, 14 Januari 2026

Publish, 15 Januari 2026

Kata Kunci :

Post-truth

Logika Mistika,

Kepercayaan,

Argumentum Ad Verecundiam,

Berpikir Kritis Demokrasi.



ABSTRAK

Manusia adalah agen perubahan dalam peradabannya. Akal menjadikan manusia sebagai makhluk yang berpikir dalam mendefinisikan lingkungan alam dan sosial, sekaligus menemukan metode penyelesaian dan penentuan sikap terhadap apa yang diasumsikan. Selain itu, manusia adalah makhluk politik/sosial bahwa setiap tindakan manusia yang memiliki tujuan harus dibatasi oleh kaidah umum agar menjaga stabilitas sosial. Penguasa sebagai bagian hierarki pemerintahan berpotensi menciptakan hoax terstruktur bagi masyarakat demi kepentingan politik melalui wacana post-truth. Dalam setiap babakan sejarah post-truth menjadi alat pengendali masyarakat sehingga kebenaran dalam suatu informasi digiring demi kepentingan kelompok penguasa. Sehingga diperlukannya berpikir kritis dalam menyerap informasi yang harus berdasarkan fakta dan data. Perlunya sikap simpati hipotesa dalam segala pemikiran, ideologi dan informasi dari orang lain sebagai bagian yang membentuk pola pikir yang murni. Sikap inilah yang kemudian membawa masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat menikmati demokrasi yang sehat dan sepenuhnya di tangan rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Sri Rahayu

Afiliasi: Universitas Sumatera Utara

Email: srirahayuaiyy@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Nusantara sudah lama dikenal dunia sebagai surganya sumber daya alam, menjadi daya tarik bangsa-bangsa Arab, Cina, India, Persia sebagai pusat perdagangan rempah dunia adapun bangsa Eropa hadir belakangan semenjak Constatinopel diambil alih kekaisaran Ottoman yang memberi kebijakan pelarangan bangsa Barat untuk melakukan perdagangan disana. Dalam tulisan-tulisan kuno penjelajah asing nama-nama pulau di Nusantara banyak diceritakan, seperti Sumatera yang dahulu dikenal sebagai *Suwarnabumi* (Tanah Emas) atau *Taprobana* nama yang diberikan Ptolemius (Reid,

2018), dalam catatan kuno India menamai kepulauan ini sebagai *Dwipantara*, adapun bangsa Arab menyebut kepulauan Jawa sebagai *Jaza'ir al-Jawi*, bahkan E.D Dekker atau dikenal nama samaran Multatuli pernah memakai *Insulinde* (kepulauan Hindia). Orang pertama yang menemukan kata Indonesia adalah James Richardson Logan dan George Samuel Windsor agar tidak terjadinya kesalahan penyebutan nama daerah jajahan. Istilah Indonesia digunakan dan dipopulerkan oleh peneliti dari Jerman, yakni Adolf Philip Wilhelm Bastian (1826-1905), yang kemudian kata indonesia digunakan secara politik pada tahun 1920-an.

Penggunaan istilah Indonesia inilah yang kemudian menjadi awal fase radikal yang dibentuk para pemuda Indonesia dengan membentuk organisasi politik, setelah sebelumnya masih menggunakan kata Indische (Hindia Belanda). Menjadi sebuah semangat baru pemuda yang setelah itu menggunakan kata Indonesia dalam nama organisasi mereka seperti Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan lainnya.

Nusantara selama ribuan tahun tercatat selalu menghadapi serangan dari luar maupun antar pulau, pada babakan sejarah Indonesia tercatat dalam sejarah setiap kerajaan masa Hindu-Buddha sampai Islam pasti menghadapi ancaman-ancaman itu, akibatnya timbulah reaksi untuk mempertahankan kekuasaan wilayahnya. Tercatat Sriwijaya pernah mendapatkan serangan dari kerajaan Cola (India), Tarumanegara, Kutai yang mendapat gangguan dari kekuatan kerajaan Funan dan kerajaan Chen-la serta kerajaan lain di Kamboja, dan Thailand. Masuknya bangsa Eropa dalam visi 3G mereka membawa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara mau tidak mau harus berkonflik dengan Belanda, Portugis, Perancis, Inggris dan Spanyol. Sedikit kemenangan yang bangsa ini raih dalam usaha itu, perlawanan bersifat kedaerahanlah penyebab banyaknya kekalahan yang dirasakan. Baru kemudian pada era 1900-an yang diawali lahirnya Budi Utomo perlawanan secara merata dilakukan dalam jalinan satu persatuan yakni Indonesia.

Namun, apakah setelah proklamasi dinyatakan oleh bangsa ini, Indonesia benar-benar merdeka 100%?. Benarkah Indonesia benar-benar berkedaulatan rakyat? Apakah ini bentuk sejati dari Republik. Benarkah bangsa ini sudah melewati tahap-tahap untuk menjadi bangsa yang merdeka 100%, baik dari segi politik, ekonomi, budaya, agama, dan logika mistika. Sehingga dalam hal ini penulis akan membahas hal itu secara detail, untuk menjadi bangsa yang benar-benar merdeka 100%. Perlu kiranya kita mengatasi masalah substansial pada negara ini perihal berpikir kritis. Sebab dengan berpikir kritis demokrasi menjadi lebih efektif dilaksanakan. Demokrasi yang pada hakikatnya bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dengan dasar filosofis *The government of reason throught the government of people*, oleh karena itu perlulah kiranya rakyat diasah pola berpikir dengan sangat sistematis terlebih pada wacana-wacana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat yang diberi mandat untuk membuat itu melalui pendidikan, sebab setiap kebijakan publik yang dibentuk akan mempengaruhi rakyat. Oleh karenanya berpikir kritis dengan arti menelaah setiap informasi murni terhadap wacana serta menguji kebenaran informasi itu bukan dengan menilai kebenaran informasi terkait pada siapa yang mengucapkan.

2. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan objek. Juga dikatakan bahwa metode adalah cara untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu dalam sistem yang terencana dan teratur. Jadi, metode selalu erat hubungannya dengan prosedur, atau teknik yang sistematis untuk melakukan sebuah penelitian disiplin tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan objek penelitian (L. Gottschalk, 1956, G.J. Garraghan, 1957).

Dalam menganalisis peran *post-truth* sejarah dalam melanggengkan logika mistika, metode penelitian yang digunakan berupa metode sejarah dengan 4 tahapan yaitu, Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Metode ini bertujuan untuk menggali secara mendalam, menguak fakta atas literatur terkait lahirnya logika mistika akibat pengaburan fakta sejarah serta mengungkapkan hal yang melatar belakangi gejala tersebut.

Metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo (2018:69) mempunyai lima tahap, yaitu;

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik atau judul sebaiknya berdasarkan, kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Hal ini saling berkaitan dalam mendukung pemilihan topik dan kelancaran penulisan penelitian. Kedekatan emosional dan intelektual artinya kondisi peneliti yang hendak meneliti suatu objek penelitian dimana disarankan seorang peneliti menulis topik penelitian yang memiliki hubungan dekat, dan keterhubungan terhadap sumber yang mendukung penelitiannya. Seperti desa tempat dia tinggal dan buku serta sumber lain yang relevan.

2. Pengumpulan sumber

Sumber sejarah disebut juga sebagai data sejarah, dan sumber sejarah ini dikumpulkan berdasarkan jenis sejarahnya. Sumber sejarah menurut bahannya terbagi menjadi dua yakni; sumber tertulis dan tidak tertulis. Sumber tertulis contohnya, tulisan terdahulu, dokumen atau arsip, sedangkan sumber tidak tertulis seperti artefak, foto-foto, video.

3. Verifikasi

Setelah topik ditentukan dan sumber sejarah sudah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya ialah kegiatan verifikasi atau kritik sumber sejarah atau menyelidiki validasi data sejarah. Verifikasi terdapat dua macam: autentisitas atau keaslian sumber (kritik ekstern) dan kredibilitas yakni data yang dapat dipercaya dengan melihat faktor yang mendukung data tersebut.

4. Interpretasi

Interpretasi bisa juga disebut sebagai penafsiran sumber sejarah. Kenapa data sejarah harus ditafsirkan? Hal itu karena data sejarah tidak dapat berbicara. Diperlukan keahlian dari peneliti untuk menafsirkan data sejarah menjadi tulisan sehingga layaklah kiranya tulisan sejarah disebut sebagai karya sastra.

Dalam penafsiran data sejarah, imajinasi peneliti diperlukan dalam penulisan sejarah agar menambah kesan keindahan dalam tulisan sejarah dan membangkitkan emosional pembaca, namun imajinasi yang berlebihan juga tidak disarankan sebab hal itu akan mengaburkan fakta dalam tulisan sejarah. Ada dua teknik dalam melakukan interpretasi data sejarah yakni dengan melakukan teknik analisis dan sintesis data sejarah yakni dengan menguraikan dan menyatukan atau menghubungkan antara data-data sejarah yang telah dikumpulkan.

5. Penulisan

Penulisan adalah tahap akhir dalam metode penelitian suatu sejarah. Namun perlu diperhatikan dalam penulisan sejarah harus diperhatikan kiranya aspek ruang dan waktunya. Agar pembaca juga dapat menangkap point dalam penulisan sejarah ada baiknya penulisan sejarah ditulis secara kronologis mulai dari latar belakang peristiwa, proses peristiwa dan akhir peristiwa sejarah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepercayaan dan Logika Mistika

Untuk mengetahui asal-muasal pencarian manusia pada Dia yang tak terlihat, *Absolute Ide*, sebutan Tuhan yang dikenalkan oleh Hegel dalam filsafatnya. Kita harus memutar waktu jauh pada perkiraan tahun 2.500.000-300.000.000 juta tahun yang lalu, dimana perkiraan waktu itu, manusia pertama kali muncul di bumi pada zaman kuartar yakni periode akhir era *Neozoikum*. Berpusat pada data "*Teori Out Of Afrika*" fosil manusia purba tertua yang diketahui adalah *Ardipithecus Ramidus*, yang ditemukan pada tahun 1994 di Ethiopia, Afrika Timur, dari tanah itulah manusia melakukan perjalanan dan menyebar keseluruh penjuru bumi, dari Asia, Amerika, Eropa dan Australia. Namun kemunculan akan keyakinan atau kepercayaan dikalangan manusia tidak hadir simultan dengan eksisnya manusia itu sendiri, hal itu kemudian dipengaruhi oleh corak-corak kehidupan manusia.

Bahwa kepercayaan tentang suatu kekuatan yang ada diluar diri manusia dan mengendalikan alam serta hal baik dan bala buruk, pada masa corak produksi berococok tanam ini muncul karena rasa khawatir mereka akan kegagalan panen, dimasa ini kondisi cuaca yang mendukung menjadi harapan yang paling dinanti ketimbang ancaman dari makhluk lain. Perasaan dan pilihan untuk percaya akan hal-hal gaib (*numinous*) merupakan dasar dari agama yang nantinya berkembang (Armstrong, 2022).

Ajaran kultus tentang kesuburan yang berawal dari sebuah mitologi (cerita rakyat) kemudian dijadikan sebagai sebuah agama pagan, hal ini memberikan bukti kuat terkait hadirnya agama pada masa awal Paleolitik pada corak produksi bercocok tanam, inilah yang kemudian menjadi dasar awal terbentuknya logika mistika. Perasaan logika mistika mendahului setiap hasrat untuk menjelaskan asal-usul dunia dan menjadi landasan bagi perilaku etika dan

moral pada saat itu dengan sanksi berupa bala dan ketidakbahagiaan di alam roh (Toynbee, 1960). Hal itu terdapat diberbagai kepercayaan tradisional di Indonesia, seperti Kejawan (Jawa), Sunda (Wiwitan), Parmalim (Toba), Kaharingan (Kalimantan), Merapu (Sumba), Aluk Todolo (Tana Toraja), dan masih banyak lagi. Di manapun juga, agama primitif ini lebih bersifat kesukuan daripada perorangan. Ritus-ritus tertentu dilakukan dengan menggunakan kekuatan gaib yang simpatik untuk membantu kepentingan-kepentingan suku, terutama dalam kaitannya dengan kesuburan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Dimana pada musim dingin adalah saat dimana matahari perlu didorong agar tidak terus melemah kekuatannya, musim semi dan panenpun memerlukan upacara-upacara tersendiri.

Upacara-upacara itu seringkali dilakukan sedemikian rupa sehingga membangkitkan gairah kolektif yang luar biasa, dimana rasa keterpisahan diantara orang-perorangan lenyap dan mereka merasakan diri sebagai kesatuan tunggal dengan semua anggota suku. Agama primitif (pagan) ini kemudian merangsek masuk kebagian setiap individu tanpa paksaan dan sebagai sebuah moral. Agama primitif menjadi dasar adat istiadat yang berfungsi sebagai pengendalian sosial yang sistematis, dimana perbuatan-perbuatan tertentu dicap sebagai tindakan kriminal dan dihukum; beberapa lainnya, meski tak dikanjar berdasarkan hukum, namun dicap sebagai tak bermoral yang berakibat kecaman sosial. Sistem hukum yang mengikat dan wajib kemudian hadir sejak pengenalan sistem pemerintahan monarki oleh kebudayaan Indo-Eropa; Hindu-Buddha yang dibawa dari darataan Hindustan.

Pada periode Hindu-Buddha dapat kita temukan baik dalam sistem hukum yang sudah diberi sanksi sosial dari kerajaan, namun tetap pula dibumbui dengan sanksi psikologis berupa ancaman tahayul hal ini bertujuan agar hukum berguna sangat efektif dikalangan masyarakat masa itu. Beberapa temuan sejarah berupa prasasti, hikayat dan juga kitab yang sudah ditemukan dan diterjemahkan oleh para sejarawan, diantaranya peninggalan Sriwijaya yakni; Prasasti Telaga Batu dan Palas Pasemah yang keduanya berisi tentang "*kutukan bagi siapa saja yang tidak setia kepada raja Sriwijaya serta bersumpah didepan para dewa, termasuk dewa lokal, bahwa siapa saja yang melanggar perintah raja akan terkena kutukan dan mati seketika* (Telaga Batu)" dan "*orang-orang jahat yang dikutuk bila tidak setia kepada raja* (Palas Pasemah)". pada bagian isi pada prasasti Telaga Batu dapat kita simpulkan meski Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan bercorak Buddha terbesar namun tidak pula mampu menyingkirkan kepercayaan-kepercayaan lokal pada masyarakatnya, meski dianggap sangat toleran dalam hal kepercayaan namun ada fakta menarik bahwa kepercayaan pagan tersebut tetap eksis ditengah gempuran agama pendatang dengan pengaruh budayanya bahwa saringan sosial masyarakat terhadap perubahan dan

ide tak pula sepenuhnya menghapus kepercayaan tersebut justru semakin variatif dengan mengasimilasikannya.

Peralihan dari sistem *primus inter pares* (kesukuan) ke feodalisme (sistem kerajaan) melanggengkan serta memperkuat logika-logika mistika yang memang sudah lama ada pada bangsa ini.

Konsep raja sebagai titisan dewa ditanamkan dengan tujuan agar rakyat patuh terhadap peraturan raja. berbanding terbalik pada kasus para filsuf di Eropa yang melawan tradisi kolot itu seperti pada kasus Socrates, para kaum brahmana/pendeta dan para kesustraan sebagai kaum intelektual justru mendukung hal itu, sial!

Faktanya jelas, dari bukti-bukti peninggalan kerajaan-kerajaan itu berupa prasasti dan kitab-kitab para pujangga. Seperti isi dari prasasti ciaruteun yang berbunyi; “*ini (bekas) dua kaki, yang seperti kaki dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia*”. Dalam salah satu kisah pada kitab *Pararaton* juga berbunyi; “*kepadanya turun petunjuk dewa, disuruh pergi ke Rabut Gunung Lejar pada hari rabu Wage*”, “*saya akan membantu menyembunyikan kamu anakku, agar tidak ada yang tau, dan saya akan menyapu di gunung Lejar pada waktu semua dewa bermusyawarah*” (kisah pemilihan Ken Arok sebagai penguasa), (Suwardhono, 2013). Pada babakan sejarah inilah fenomena *post-truth* yang pertama dilakukan pada bangsa ini.

Hal itu dilakukan semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan raja yang dianggap titisan dewa, dimana sang raja dianggap telah mencapai purifikasi diri dengan dewa, sehingga rakyat mestilah patuh pada sang raja sebab segala titah darinya adalah wahyu dari dewa (Tuhan). Pada masa babakan sejarah Indonesia sumber sejarahnya terlalu *kingdom sentris* yang berpusat pada situasi kerajaan seperti kebajikan, kejayaan, penaklukan dan pemberontakan, kurang dalam menyoroti perihai kehidupan sosial masyarakatnya pada masa-masa itu, terdapat sedikit namun itupun hanya menggambarkan ketentraman masyarakat atas kebijakan politik yang diberlakukan pada masa itu agar mendukung kepiawaian sang raja dalam memerintah.

Perlunya kita mencurigai sumber sejarah pada masa itu dalam kacamata *Dionysian*-nya ala Nietzsche bahwa keharmonisan, ketentraman, dan kebajikan yang disajikan dalam sumber sejarah hanyalah ungkapan yang menyembunyikan dan menyublimeskan praksis kehidupan masa itu yang serba keras, senjang dan kacau. Bukan hanya sebagai bentuk kecurigaan semata, dalam beberapa bukti sejarah pada babakan sejarah Hindu-Buddha banyak ditemukannya beberapa pemberontakan yang mungkin dilakukan atas dasar ketidakadilan yang terjadi dimasyarakat namun dibumbui seakan itu adalah pemberontakan kepada sang raja, sebab ada

dua bentuk penghancuran atau kekacauan sosial bisa dapat terjadi bilamana manusia tidak lagi memperhatikan hukum sebab hukum yang dibuat tidak memperhatikan manusia dalam hal ini masyarakat. Pada babakan baru saat Islam datang ke Nusantara-pun tidak menghilangkan status suci sang raja dalam perhelatan politik dan kekuasaannya.

Aceh sebagai kekuatan Islam terbesar di Asia dalam paruh pertama abad abad ke-17 dalam perdagangan dan politiknya. Bilamana dalam adat Aceh dan kisah-kisah para pedagang dan duta besar yang berkunjung ke kesultanan Aceh, hampir tidak dapat dipercaya betapa banyak waktu dan tenaga kerajaan yang digunakan untuk menyelenggarakan pesta perhelatan, arak-arakan, pertunjukan dan hiburan dari kerajaan (Reid, 112). Hal itu dilakukan bukan hanya di Aceh namun kerajaan-kerajaan lain dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa raja adalah pusat sebuah drama besar dan dalam drama itu ia tidak saja mewakili kekuasaan tetapi juga mewakili harta benda, semangat kepatuhan, pencerahan dan kemurahan hati. Pertunjukan-pertunjukan itu bukan sekedar pelampiasan keinginan hati sang raja tanpa mengenal batas, melainkan pertunjukan untuk menampilkan kekuasaannya. Melalui upacara-upacara megah yang terpusat pada diri raja dan kerajaanya, sebagai bukti eksistensi kekuasaan yang absolut yang ditujukan kepada rakyat dan tetangganya bahwa raja benar-benar raja sejati, dengan kekuasaan yang berlandaskan pada tatanan alam semesta aturan ilahi.

Dalam praksisnya, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan istana dan kerajaan selalu diringi oleh arak-arakan, musik, tarian, dan hiburan terlebih dalam upacara agama sebagai *rites the passage*; seperti sunat, perkawinan, dan pemakaman. Pada masa sultan Iskandar Muda, pernikahan di keluarga istana kesultanan Aceh diiringi arak-arakan gajah yang dihias semegah mungkin, dimana pada saat itu gajah sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan sebab menjadi alat tempur paling kuat dimasanya (Djakariah, 2019). Selain itu pada prosesi pernikahan sang mempelai berpakaian begitu indahnya, kemudian berlutut dihadapan sultan, sultan kemudian memerciki pangeran dengan air suci yang dilihat sultan dalam mimpinya dibawa dari surga oleh malaikat (Reid, 114). Hal ini menunjukkan keabsahan kedudukan Iskandar Thani diatas tahta kerajaan Aceh, tetapi kita tahu dari orang luar bahwa perhelatan-perhelatan semacam itu memang sengaja dirayakan secara besar-besaran untuk melambangkan hal-hal gaib hak dinasti yang berasangkutan untuk memerintah, sehingga layaklah sultan dan kerajaanya itu sebagai *Leviathan*-nya para rakyat aceh dalam menjaga hak dan keamanan rakyat sebagai penguasa yang diagungkan sebab dianggap kekuasaan dari Allah.

Pada dua babakan sejarah ini dalam tradisi feodal benar-benar melekatkan unsur logika mistika didalamnya, dengan tujuan agar tidak adanya kritik yang dilakukan rakyat. Kebebasan berpikir oleh

rakyat dimasa itu sangat tidak dianjurkan sebab dengan memberi kritik kepada raja berarti orang itu telah menghina pilihan Tuhan. Wacana-wacana dan kebijakan itu sepenuhnya dikuasai oleh kerajaan dan dalam logika kekuasaan mustahil wacana itu tidak mendukung kekuasaan sang raja sekalipun itu bertentangan dengan realitas yang terjadi pada masa itu. Wacana dan berita yang dikuasai oleh kerajaan inilah yang memainkan perasaan dan opini publik sehingga rakyat seakan mengkonsumsi obat penenang ditengah penderitaan.

Ditengah kebobrokan sistem feodal pada babakan sejarah ini rakyat tidak benar-benar dapat berbuat banyak untuk melakukan revolusi dalam menghancurkan sistem feodal ini seperti pada revolusi Prancis, sebab kualitas masyarakatnya yang belum mencapai kesadaran tentang hak asasi.

Pada babakan setelahnya kerajaan lokal sebagai media feodalisme yang ditaklukkan digunakan sebagai alat menaklukkan rakyatnya oleh kolonialis Eropa yang datang pada paruh abad 15, hal ini memperkuat budaya feodalisme di negeri ini serta memperparah keadaan rakyat. Politik kolonialis Eropa memang memanfaatkan pengaruh feodal penguasa lokal untuk diangkat menjadi pejabat bayaran sebab para raja lokal bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan juga sebagai kepala adat dan agama. Meskipun di tengah dampak kolonialisme Eropa yang begitu kejamnya dalam mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alamnya, Eropa dengan utang balas budi menjadi cahaya ditengah kegelapan yang mengerikan, karena telah membangun intelektualitas di Indonesia. Politik Etis inilah yang membawa Indonesia menuju zaman pencerahan, oleh karenanya membawa Indonesia pada kemerdekaannya namun tidak menghilangkan kanker yang sudah diidap lama oleh bangsa ini yakni logika mistika dan budaya feodalnya.

Post Truth

Apa Itu Truth?

Truth (kebenaran) bukan sesuatu yang asing bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran adalah negasi dari kesalahan. Bagus (1996:412) menjelaskan istilah kebenaran merupakan lawan dari kesalahan, kesesatan, kepalsuan, dan opini. Pada konsep kata kebenaran seperti (*truth*: Inggris, *treowth* [kesetiaan]: Anglo-Saxon, *veritas*: Latin, *alerheia*: Yunani). Namun seperti apa bentuk dari kebenaran itu?, sebagai contoh; terjadi longsor yang disertai oleh banjir disuatu wilayah komunitas adat, hal itu menimbulkan kerugian besar. Namun ternyata salah satu media cetak menyebut ini adalah kesalahan mutlak dari perusahaan terkait akibat penebangan secara masif yang mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga terjadi ketidakseimbangan alam, pohon yang berfungsi sebagai resapan air tidak cukup menahan, sehingga hal itu menyebabkan kekuatan tanah tak lagi mampu menjalankan perannya ditambah hujan yang melanda. Buktinya cukup kuat, dan tuduhan yang dilempar oleh media itu benar.

Sehingga kiranya dapatlah dirumuskan dengan jelas dalam Bagus (1996:42) bahwa kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, dalam hal ini subjek dengan apa yang diketahui, yang disebut juga objek. Dengan demikian kebenaran dapat juga diartikan secara umum sebagai kenyataan sebagaimana adanya yang menampakkan diri sebagai yang ditangkap melalui pengalaman indera.

Pengalaman tentang kebenaran itu dialami akal oleh si subjek dalam kesamaanya dengan kenyataan adanya yang menampakkan diri kepadanya. Pengetahuan (akal) menjadi media si subjek untuk melihat sebab-akibat serta melakukan pengumpulan bukti yang ada untuk memperkuat pernyataannya.

Pada awalnya, pembahasan dalam kebenaran ini lebih terfokus pada sumber pengetahuan (*the origin of knowledge*) dan teori tentang kebenaran (*the theory of truth*) pengetahuan. Kebenaran merupakan sifat dari pengetahuan, namun pengetahuan seperti apa?. Pengetahuan haruslah bersumber pada panca indera, akal pikiran yang sehat, *tesis-antitesis-sintesis*, pola korespondensi, koherensi atau praktis-pragmatis.

Kebenaran haruslah bersifat objektif (*universal*) dan bukannya subjektif (*personal/kelompok*). Bahwa sebuah kebenaran objektiflah menurut Marx, ekonomi adalah penggerak sejarah, dan bukannya *absolute ide* yang dicetuskan Hegel. Bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara sejak abad ke-15 dipengaruhi oleh faktor dorongan ekonomi akan kebutuhan mereka pada rempah-rempah sejak pelarangan bangsa tersebut datang ke Konstantinopel untuk berdagang oleh kekaisaran Utsmani. Kebenaran sangat rapuh ketika hal itu didasarkan atas subjektivitas karena bisa bersifat pragmatis bagi suatu kelompok, seperti dalam filsafat David Hume, bahwa empirisme pribadi (perasaan) yang menghasilkan moral sejati, dalam arti bahwa benarliah tindakan pembunuhan masal jika itu baik untuk individu maupun kelompok, ini keliru!.

Pengertian Post Truth

Post Truth dalam Oxford English dictionary (2019) didefinisikan sebagai keadaan dimana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan menarik emosi dan keyakinan personal. *Post truth* merupakan kondisi ketika “fakta-fakta alternatif” menggantikan fakta aktual dan perasaan memiliki bobot lebih tinggi dari bukti-bukti (McIntyre, 2018, hal. 2). Era *Post truth* dimana perasaan seringkali lebih penting daripada fakta itu sendiri. Hal itu terjadi karena adanya kepentingan dan keuntungan oleh segilintir orang atau penguasa yang memang menguasai media masa sebagai alat paling mutakhir abad ini dalam menggiring opini publik sesuai kepentingan mereka, sehingga kebenaran pada era ini menjadi sangat subjektif sebab didasari atas tindakan kepentingan.

Post Truth (pasca kebenaran), keadaan apa yang terjadi sebelum sebuah *post truth* di berikan kepada masyarakat. Seperti yang ditekankan pada paragraf sebelumnya, bahwa suatu kesesatan, dan bahaya yang hebat ketika kebenaran didasarkan atas subjektivitas semata. Sehingga kebenaran itu digunakan untuk kepentingan suatu kelompok dalam hal ini pemangku kuasa. Suatu paradigma dalam masyarakat akan terus berdialektika (berubah) mengikuti zamannya.

Dapat kita perhatikan pembahasan sebelumnya, dalam babakan sejarah Indonesia bahwa *post truth* digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. *Post truth* hadir apabila realitas sosio-politik dalam sebuah kekuasaan tidak sejalan dengan tujuan politik penguasa, sehingga wacana *post truth* digunakan dalam membentuk opini publik agar mendukung politik kelas penguasa. Namun, paradigma sosial akan terus berkembang ditengah arus ilmu pengetahuan sehingga, kelas penguasa juga ikut berkembang dalam memainkan manipulasi politiknya demi melanggengkan kekuasaan.

Menurut Erich Fromm dalam bukunya yang berjudul “Kebesaran dan Batas-batas Pemikiran Freud” pemikiran kreatif selalu merupakan pemikiran kritis karena ia benar-benar jauh dari ilusi tertentu dan lebih dekat kepada kesadaran akan realitas. Namun, disisi lain, sang pemikir mengungkapkan pemikiran barunya didalam semangat zamannya.

Masyarakat-masyarakat yang berbeda mempunyai jenis “akal sehat” yang berbeda, kategori-kategori pemikiran yang berbeda, sistem-sistem logika yang berbeda; setiap masyarakat memiliki “saringan sosial”-nya yang berbeda yang hanya dapat dilalui ide-ide, konsep-konsep dan pengalaman tertentu; hal-hal yang tidak perlu yang niscaya tetap tak disadari dapat menjadi disadari ketika saringan sosial berubah seiring dengan perubahan fundamental didalam struktur sosial. Pemikiran-pemikiran yang tidak lolos dari saringan sosial masyarakat tertentu pada masa tertentu adalah yang “tak terpikirkan” dan juga tentunya tak terkatakan (Fromm, 14). Hal ini menegaskan bahwasannya materi (realitas) akan mempengaruhi ide masyarakat demikian pun kelas penguasa. Masa awal mengenal cara bercocok tanam dimasa neolitikum, kepercayaan mulai hadir atas desakan rasa ingin tahu mereka dan rasa khawatir atas kegagalan panen, sehingga periode awal ajaran kultus tentang Tuhan kesuburan hadir dikalangan masyarakat periode ini, hal itu dibuktikan dengan hadirnya mitologi-mitologi tentang dewa-dewi kesuburan seperti, mitologi dari Timur Tengah salah satunya Kanaan yang menyebut dewa kesuburan mereka sebagai *Baal*, dewa *Maat* dalam peradaban Mesir tak ketinggalan pula Dewi *Sri* (padi) dalam kepercayaan yang ditemukan di wilayah Jawa, Sunda dan Bali.

Fenomena ini terjadi karena pada saat itu cara berpikir manusia masih sangat sederhana dalam

menafsirkan peristiwa alam dan masyarakat yang terjadi disekitarnya, karena kebutuhan manusia itu ada dua yakni kebutuhan jasmaniah (sandang,pangan, papan) dan batiniah (hati dan pikiran tentang keingintahuan) pada lingkungan. Sehingga mitos-mitos tadi adalah upaya manusia dalam memenuhi keingintahuan yang besar oleh mereka akan alam, hal yang unik bukan? Manusia menciptakan sebuah drama tentang alam semesta yang dapat meyakinkan manusia lain, kemudian menjadikan mitos itu sebagai kepercayaan dan menyembah hasil pemikiran mereka sendiri. Namun, diperadaban Barat dan sebagian Timur Tengah sudah meninggalkan cara berpikir kolot seperti ini, hal itu karena terjadi peningkatan akal sehat dikalangan masyarakat barat yang simultan oleh perkembangan saringan sosial sehingga membawa mereka jauh menjadi bangsa yang unggul. Bahwa suatu fakta sejarah yang memalukan bahwasannya ketika di abad ke 4 Masehi Nusantara baru mengenal tulisan, di belahan bumi lain, Eropa sudah mempelajari berbagai aliran filsafat, maka tak mengherankan pulalah kita jauh tertinggal dari bangsa yang akhirnya akan menjajah kita.

Fenomena *Post Truth* di Indonesia

Fenomena *post-truth* merupakan suatu kondisi dimana seringkali fakta aktual digantikan oleh daya tarik emosi dan prasangka pribadi dalam upaya mempengaruhi opini publik dalam artian pada paragraf sebelumnya bahwa perasaan menjadi alat ukur kebenaran suatu informasi sebab fakta dan data dikesampingkan (Omar, 2021).

Pada pembahasan sebelumnya, kisah-kisah hebat raja yang dibumbui dengan imajinasi tentang raja sebagai titisan dewa ini kemudian diceritakan kepada rakyat menjadi sebuah kebenaran. Dalam ilmu logika, terdapat istilah *Argumentum ad Verecundiam* dan ini adalah kesalahan berpikir, dimana kebenaran informasi ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang menyatakannya, bukan atas eksistensi kebenaran itu sendiri. Jadi suatu informasi itu benar hanya karena informasi itu dikemukakan oleh seorang yang sudah terkenal sebagai ahli seperti profesor, dosen, presiden, dan para pujangga serta ahli kitab pada masa babakan sejarah klasik Indonesia. Sehingga cerita-cerita yang dikarang para pujangga dan pendeta pada kitab-kitab kesustraan dan prasasti itu dianggap sebagai kebenaran yang mutlak sebab, pada masa itu para pendeta dan pujangga kesustraan sebagai orang yang dianggap ahli dibidangnya, miris!. Kondisi *post-truth* itulah yang memperkuat logika mistika semakin mengakar pada bangsa ini, bahkan 400 tahun setelahnya agama Islam dan Kristen masuk pun sudah mengenal pengetahuan, tak pula juga menghapus *habbit* mereka dalam kepercayaan pada mitos-mitos itu yang sudah mendarah daging.

Akibat dari kebenaran yang dihasilkan di era *post truth* merujuk pada sebuah kondisi dimana kebenaran terancam, dan masyarakat terancam kehilangan arti dari substansi kebenaran itu sendiri.

Post truth menjadi strategi yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk mengontrol arus informasi, sehingga dengan kontrol tersebut akan dapat mengontrol masyarakat (McIntyre, 2018, hal. 13).

Dimasa babakan sejarah *after colonialisme* Indonesia mulai menemukan sistem demokrasi sebagai bentuk sistem pemerintahan, namun mengalami berbagai gejala perubahan, mulai dari demokrasi liberal, parlementer, dipimpin hingga demokrasi pancasila yang dikenalkan masa orde baru. Sekalipun sudah menerapkan demokrasi sebagai sistem yang sangat efektif, Indonesia tetap dihadapkan pada problematik politik mengapa demikian?.

Rousseau pernah berkata: “Demokrasi itu ibarat buah. Penting untuk pencernaan, tetapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya”(Russel, 2002). Meskipun dalam data sejarah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia sempat menduduki peringkat baik dalam hal demokrasi pada kurun waktu 2005-2013 menurut lembaga Independent Freedom House (IFH) dengan predikat negara bebas sejajar dengan Australia, Finlandia dan Kanda. Namun kemudian merosot pada kurun waktu 2014-2018 pada masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo kurun waktu ini simultan dengan hadirnya fenomena *post truth* yang ditetapkan sebagai istilah abad 21 ditengah maraknya berita palsu (*hoax*) oleh Oxford Dictionary.

Mengutip pendapat Stuart Sim dalam (Zainul, 2021), fenomena *post truth* menciptakan masalah dengan skala besar di negara-negara yang menganut demokrasi, mengingat sistem tersebut menekankan pada penggunaan akal sehat sebagai kunci untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Akibatnya terdapat kebebasan berpendapat dan berekspresi yang cenderung berdasar subjektivitas belaka, sehingga masyarakat era *post truth* yang konsumernya cenderung menerima informasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau nilai dalam informasi tersebut. Selama itu sesuai dengan keyakinan dan kedekatan emosional maka itu dapat diterima. Sehingga menerima sebuah informasi, meskipun tanpa pertimbangan tentang masuk akal atau tidaknya, baik atau buruknya tidak lagi menjadi tolak ukur melainkan ketika informasi itu sesuai dengan keyakinannya yang dangkal. Akibat yang paling fatal ialah lahirnya *habit* banalitas kebodohan dalam menyerap informasi. Dimana menurut Bonhoeffer, “Kebodohan lebih berbahaya daripada kejahatan, sebab kita bisa memprotes kejahatan, menyingkapnya dengan kekuatan, namun dengan kebodohan kita tidak berdaya”. Sebab orang bodoh bukanlah mereka yang tidak memiliki kecerdasan, tetapi mereka yang kehilangan dalam kemandirian berpikir sebab mereka hanya mengulangi, mempercayai, dan melakukan apa yang mereka dengar. Hingga diakhir hayatnya ia menulis harapan pada dunia “Jangan hanya takut pada kejahatan yang

aktif, takutlah pada kebodohan yang membiarkan kejahatan itu berkuasa”.

Penyakit lambung seperti apa yang terjadi pada negeri ini pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sehingga tidak mampu menyerap nutrisi baik yang diberikan oleh demokrasi?, tak lain tak bukan adalah korupsi. Jika membahas soal korupsi yang merupakan masalah besar dan kompleks, kita harus menelaah secara mendalam menggunakan *logical reasoning* yang dikenalkan dalam novel Sherlock Holmes yakni *square one* (tahap awal) yaitu *definition* (pengertian), dimana definisi inilah yang menjadi dasar hukum dibuatnya undang-undang korupsi. UU korupsi dibuat setelah reformasi sebagai salah satu tuntutannya dengan asas penggunaan secara lurus informasi publik karena memang pada saat itu media dikekang oleh rezim orde baru.

Korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi atau pejabat publik untuk keuntungan pribadi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan. Korupsi dapat terjadi karena adanya surplus kekuasaan pada pejabat publik yang mengakibatkan kesenjangan kekuasaan sehingga terciptanya *superordinat* dan *subordinat*.

Dalam banyak kasus pada masa pemerintahan Joko Widodo banyak ditemukan kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan negara Indonesia kerugian hingga triliunan rupiah. seperti kasus Idrus (menteri sosial) dalam proyek PLTU menerima suap sebesar 2,25 miliar rupiah, Imam Nahrawi (menteri olahraga) sebesar 20 miliar, Edhy Prabowo (menteri laut dan perikanan) sebesar 25,7 miliar, Juliari (mensos) bansos covid 19 sebesar 32,48 miliar, Setya Novanto kasus E-KTP sebesar 2,3 triliun, kasus Pertamina sebesar 193,7 triliun. Semua kasus diatas benar-benar berdampak pada masyarakat yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan prevalensi stunting 21,5% ditahun 2023, serta rata-rata IQ orang Indonesia berada di skor 78,49 ini imbas dari kebijakan yang tidak memikirkan tujuan konstitusi negara Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Ruang lingkup korupsi bukan hanya semata soal ekonomi berupa keuntungan, namun juga penyelewengan kekuasaan demi melanggengkan kekuasaannya. Bahwa pemerintah dengan kekuasaannya yang *superordinat* berpotensi sebagai pencipta *hoax* dan mampu menggiring opini publik sesuai kepentingan kekuasaannya sebab mempunyai instrumen politik yang lengkap dalam mewujudkan tujuan politiknya. Sebagai bukti fenomena *buzzer* yang muncul pada periode pemilu 2019-2024, sebagai suatu kelompok yang dibayar menyebarkan informasi atau opini pada media sosial bertujuan dalam membentuk opini publik atau mempromosikan sesuatu. Selain itu Presiden Jokowi terendus menggunakan kekuasaan *superordinat*-nya sebagai presiden untuk mengintervensi hakim Mahkamah Konstitusi agar anaknya Gibran Rakabuming Raka

dapat mencalonkan diri sebagai wakil presidennya Prabowo Subianto terkait dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana MK menolak uji materi pasal 169 huruf Q UU Pemilu (UU 7/2017), yang memperbolehkan calon yang belum berusia 40 tahun namun sudah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah maju sebagai capres/cawapres. Ini membuktikan bahwa pemerintah telah melanggar UU korupsi sesuai definisi sebelumnya, bahwa pemerintah telah mengalami *banality of evil* demi melanggengkan kekuasaannya. Lantas bagaimana seharusnya rakyat bertindak sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, apa solusi dari masalah ini.

Indonesia Saat Ini

Indonesia sebagai sebuah bangsa sedang mengalami keretakan yang kompleks, akibat dari menurunnya indeks demokrasi yang mengarah pada skor 6,44 pada tahun 2024, yang menempatkan Indonesia pada kategori “demokrasi cacat”. Dimana aspek penilaian demokrasi terdapat tiga point yakni; kebebasan, kesetaraan, dan peran lembaga. Pada poin kebebasan menurun akibat pemerintah memagari rakyat untuk berekspresi dalam UU ITE, UU cipta kerja yang sangat kontroversial yang dikenal sebagai Omnibuslaw ternyata membatasi hak-hak buruh. Pada poin kesetaraan, bahwa pemerintah terbukti melakukan perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat adat, seperti kasus IKN (Ibu Kota Nusantara) yang berpotensi merusak masif ekosistem lingkungan hutan Kalimantan sebagai “paru-paru” dunia, perampasan tanah di desa Wadas, dan juga kasus-kasus tanah masyarakat adat Batak. Pada poin terakhir tentang peran lembaga. Lembaga hanya berperan untuk mencekik rakyat. Menurut data kemenkeu utang negara Indonesia pada April 2025 sebesar 431,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp7.033,45 triliun jumlah ini naik 8,2% secara tahunan. Jika hutang itu dibagi kepada penduduk Indonesia yang berjumlah 281,2 juta jiwa maka setiap orang di Indonesia harus membayar utang tersebut sejumlah Rp25 juta per orang.

Negara ini butuh lebih dari 85 tahun untuk bisa minimal mendekati Jepang atau Cina. Sebab di awal tahun 1946 Jepang dan Cina berada pada posisi yang sama, karena Cina dan Indonesia menjadi negara yang baru terbebas dari kolonialisme, sedangkan Jepang menjadi negara yang kalah pada perang dunia ke-2 yang mengakibatkan negara itu membangun kembali kekuatannya yang sudah porak poranda.

Cina dan Jepang paham betul hal substansial dalam membangun negara mereka, bahwa negara yang baru lahir setelah keterpurukan akibat perang adalah dengan kembali belajar berjalan sebelum kemudian berlari mengejar ketertinggalan. Hal pokok yang kedua negara itu pusatkan adalah pendidikan!, karena mereka adalah negara yang memahami betul sejarah peradaban, yakni membangun sebuah peradaban yang maju, perlu bahan bakar berkualitas yang namanya pendidikan. Indonesia yang dibentuk

oleh para pemikir bangsa yang hebat, Hatta, Tan Malaka, Syahrir, Ki Hajar Dewantara, M. Yamin, dan Soekarno adalah pemuda cerdas yang diakui dunia. Pancasila sebagai asas hukum dan pandangan hidup bernegara sangat efektif digunakan ditengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Namun Indonesia menjadi negara yang pincang dan setengah matang karena harus menghadapi konflik dalam dan luar dalam mempertahankan kemerdekaannya menjadi salah satu faktornya. Faktor yang paling utama ialah para pemimpin negeri ini tidak benar-benar berfokus pada tujuan konstitusi awal sebelum negara ini dibentuk yakni; mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan rakyat. Faktanya, silih bergantinya para presiden, kebijakan mereka hanya bersifat pembangunan fisik, Soekarno dengan program Mercusuaranya, Soeharto dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), Habibie dengan pembangunan teknologi, Megawati yang sibuk dengan tuntutan reformasi seperti KPK, namun dikemudian hari ikut memberi dukungan untuk pelemahan KPK, SBY yang sibuk dengan sektor energi dan transportasi, adapun perihal pendidikan hanya berupa dana bos, serta Jokowi yang fokus pada infrastrukturnya. Sehingga sulit bagi negara ini untuk berkembang jika masalah substansial negara ini belum diselesaikan.

Nampaknya para penguasa dan oligarki di negara ini memahami betul sejarah peradaban, sehingga pendidikan itu tidak sepenuhnya diperhatikan sebagai masalah penting. Hal itu agar rakyat tidak berpikir kritis tentang keadaan kehidupan mereka yang serba sulit disebabkan oleh kebijakan pemerintah, oleh karenanya pendidikan itu tidak diberikan secara penuh, jikalau ia maka penguasa akan menggali kuburan mereka sendiri, sebab rakyat secara kolektif sadar akan ketertindasan mereka yang dilakukan oleh pemerintah.

Indonesia yang Akan Datang

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus berani memilih secara tegas kemana negara ini kedepannya, apakah ingin terus digiring demi kepentingan politik penguasa atau kepentingan kolektif rakyat. Rakyat harus menentukan apakah negara ini akan menjadi *Republic of hope* atau *republic of fear*.

Akal sehat, secara rasional dan kritis tentu akan memilih *republic of hope* daripada *republic of fear* yang dibentuk para penguasa (Marz, 2020). Membaca informasi secara menyeluruh, memverifikasi data dan faktanya dilapangan adalah proses berpikir kritis untuk mencapai sebuah kebenaran. Sehingga dapat melahirkan sebuah pernyataan yang tidak bersifat subjektif dan mudah digiring oleh kepentingan politik kelompok.

Peningkatan literasi memang seharusnya perlu digalakkan dimulai dari diri sendiri sebagai pihak internal yang menentukan. Memahami prinsip demokrasi yang dalam arti dari rakyat, oleh rakyat

dan untuk rakyat bukan hanya sebagai sebuah slogan utopis, bahwa rakyat harus melek terhadap produk kebijakan yang di buat oleh pejabat publik sebab setiap kebijakan itu berdampak pada rakyat. Mengkritisi kebijakan yang dinilai merugikan serta tak berpihak pada rakyat merupakan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sehingga rakyat haruslah terutama memilih secara bijak *Leviathan* (pemimpin)-nya bukan berdasarkan plutokrat melainkan seorang teknokrat (ahli). KPU sebagai lembaga yang berperan dalam pemilihan pemimpin negara seperti ini harus dibenahi dalam hal program teknisnya. Seluruh bakal calon pemimpin negara harus melewati tiga tahap ujian diantaranya etikabilitas, intelektualitas dan elektabilitas.

Pada tahap etikabilitas seorang calon pemimpin kiranya diuji dalam hal moralitasnya dalam tolak ukur baik dan buruknya sehingga itu akan menjadi acuan dasar apakah calon pemimpin itu akan membuat kebijakan yang merugikan atau menguntungkan rakyat. Ditahap kedua calon pemimpin itu akan diuji dalam ranah intelektualitasnya apakah wawasan dia mumpuni dalam memimpin, sebab pengetahuannya sangat berperan dalam penentuan kebijakan publik, apakah produk kebijakan itu nantinya akan memiliki implikasi kedepannya, seperti kebijakan yang banyak menyebabkan kerusakan ekosistem alam. Jika kedua tahap penting itu sudah diuji, tahap elektabilitas atau suara pemilihan rakyat yang menentukan pemimpin mana yang benar-benar layak memerintah negara ini, itu pun harus dipantau transparansinya agak sesuai asas Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Jika ketiga tahap ini dilaksanakan dalam teknis KPU, kiranya rakyat dapat mengantisipasi pemimpin plutokrat, atau pemimpin yang di pengaruhi oleh oligarki yang merugikan rakyat.

Apabila hal ini dilakukan, kedepannya demokrasi kita kiranya akan benar-benar sepenuhnya ditangan rakyat, untuk kepentingan rakyat dan dipastikan Indonesia akan berhasil mendapatkan bonus demografi 20 tahun yang akan datang menuju Indonesia maju.

4. KESIMPULAN

Pengkultusan tokoh sebagai acuan dasar berpikir kiranya haruslah dihilangkan, bahwa rakyat berhak mengkritik pemerintah jika dinilai tidak berpihak pada rakyat, sebab itulah seharusnya tujuan pemerintah yakni melayani rakyat. Perlunya rakyat mengambil sikap intelektual dalam memahami perannya sebagai rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, "*Vox Populi, Vox Dei*"-suara rakyat adalah suara Tuhan.

Namun demikian sikap kita terhadap wacana *post truth* adalah dengan menaruh rasa curiga pada setiap informasi. Tidak perlunya penghargaan berlebihan terhadap tokoh politik, pejabat maupun

influencer atau siapapun juga. Dalam mempelajari informasi yang diberikan oleh tokoh, diperlukan semacam sikap simpati hipotetis, sampai kiranya terbuka kemungkinan untuk mengetahui apa kiranya yang meyakinkan dalam teorinya, dan barulah kemudian di kedepankan sikap kritis guna membangun statemen yang tak digiring oleh kepentingan politik melainkan kepentingan kolektif rakyat.

5. REFERENSI

- Anthony, R. (2018). Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV.
- Djakariah. (2019). Sejarah Indonesia II. Penerbit Ombak.
- Herman, P., & Fitzerland, K. S. (2023). Truth, Post Truth, dan Dinamikanya di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(1).
- Karen, A. (2022). Sejarah Tuhan. PT. Mizan Pustaka.
- McIntyre, L. (2018). Post-Truth. MIT Press.
- Mohammad, R. O. A. R., & Mumuh, M. Z. (2021). *Truth dan Post Truth* Dewasa Ini. *Sosfilkom: FISIP UMC*, 15(2).
- Russel, Bertrand.2002. *Sejarah Filsafat Barat*: Pustaka Pelajar.
- Salma, N. R. (2024). Disinformasi di Era *Post-Truth*: Ancaman terhadap Demokrasi dan Mobiltas Global. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(1).
- Suwardono. (2013). Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha. Penerbit Ombak.
- Sutrisno dan Putranto. 2005. *Teori-teori Kebudayaan*: Kanasisu.
- Sim, S. (2019). *Post-Truth, Scepticism, and Power*. Palgrac MacMillan.
- Sri, U. W., & Firdaus, W. S. (2023). Fenomena *Post-Truth* Sebagai Alat Gerakan Sosial Politik Pada Pemilihan Presiden 2019 (Studi Perubahan Sosial). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(3).
- Toynbee, A. (1960). *A Study Of History*, New York and Toronto: Oxford University Press.
- Wera, M. (2020). Meretas Makna Post-Truth : Analisis Kontekstual Hoax, Emosi Sosial dan Populisme Agama. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 7(1).
- Zainul, A. (2021). Kebenaran di Era *Post-Truth* dan Dampaknya bagi Keilmuan Akidah. *Fikrah: Jurnal Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan*, 9(2).